

## **Etika Pembangunan Ekonomi terhadap Kaum Miskin**

**Helena Anggraeni (Reni) Tjondro Sugianto**  
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuna  
Email: helena@shantibhuana.ac.id

### ***Abstract***

*Poverty and underdevelopment will be easily found everywhere. In reality, the development of many regions actually is not left behind but left behind on purpose. Ironically, the conditions left behind occur through a process that seems to never be left. This happens with the provision of economic assistance and various development policies that replicate patterns of other places without seeing the real situation in the field. Giving help without seeing who receives the assistance so that the impression arises that the regions are not left behind when they are actually left behind. That is why Development Ethics in the economic field for those who are poor becomes important, so that no region else is left in this country. The goal of this writing is to describe economic development in the past, especially in the field of underdeveloped area which is influenced by external policies.*

**Keyword:** *poverty, economic development, region, left behind*

### **A. Nama Bagi Kaum Lemah**

Sejak dahulu kala golongan masyarakat yang lebih lemah selalu tunduk kepada golongan yang lebih kuat. Kaum kuat tersebut memanfaatkan kaum yang lemah, bahkan yang lebih hebat lagi, tak jarang mereka juga memberi nama kepada kaum yang lebih lemah. Ketika negara-negara di belahan bumi bagian barat mengalami kemajuan ekonomi karena berkembangnya industrialisasi khususnya di bidang manufaktur, mereka pun memandang negara-negara yang belum mengalami industrialisasi sebagai negara yang lebih lemah daripada mereka. Dan negara-negara yang lemah ini pun mereka beri nama: negara berkembang. Ketika manusia pertama, Adam, diminta untuk memberi nama kepada makhluk-makhluk hidup lainnya, ia pun mempunyai kuasa atas makhluk-makhluk tersebut. Ketika orang tua memberi nama kepada anaknya, mereka pun mempunyai kuasa atas anak itu sebagai orang tuanya. Ketika bangsa kolonial memberi nama Flores kepada Nusa Nipa, mereka pun menguasai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat di sana. Akhirnya, ketika negara-negara Barat itu memberi nama negara-negara berkembang, mereka pun mencoba menguasai negara-negara tersebut dengan ekonomi mereka, kebijakan-kebijakan dan ideologi mereka, militer mereka, bahkan juga kebudayaan mereka.

Anehnya, pemerintah pusat pembangunan memandang usaha penguasaan tersebut sebagai “bantuan” dan mereplikasikannya terhadap daerah-daerah di bawah pemerintahannya. Pemerintah daerah kemudian mereplikasikannya ke pemerintah daerah di bawahnya lagi, demikian terus menerus beregenerasi hingga sampai ke rakyat lapisan terbawah. Akhirnya, yang paling tak berdaya dan hanya menerima saja adalah mereka yang disebut sebagai kaum miskin. Mereka miskin karena mereka dianggap sebagai golongan yang tak berdaya dan tak memiliki pilihan. Hal ini sangat kentara terjadi dalam pembangunan di Indonesia pada zaman Orde Baru sampai Reformasi. Baru pada masa pemerintahan terakhir periode 2015-2019 terlihat adanya berbagai usaha untuk keluar dari kungkungan ini. Walaupun demikian, menengok fenomena ke belakang yang telah memenjarakan pembangunan perekonomian di

Indonesia sebelum ini dipandang tetap perlu sebagai evaluasi pembelajaran dalam pembangunan selanjutnya.

## **B. Munculnya Orang Miskin**

Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh (Escobar 1995), bahwa dari sekian banyak perubahan yang terjadi di awal era sesudah Perang Dunia II adalah ditemukannya kemiskinan massal di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ketika negara-negara Barat mengalami kemajuan ekonomi karena industrialisasi mereka, maka mereka pun berusaha memberikan “bantuan”-nya kepada negara-negara berkembang yang tidak terlalu kaya industri. Pada saat itulah negara yang tidak kaya industri dianggap miskin walaupun memiliki sumber daya alam yang kaya. Akan tetapi, rupanya kekayaan yang dimaksud tidak tergantung seberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki tetapi seberapa besar kemampuan untuk mengolah kekayaan alam tersebut. Lagi-lagi, larinya ke industrialisasi. Para petani sederhana yang tadinya tidak mengenal masalah industri ditawarkan berbagai pekerjaan dalam industri padat karya sehingga akhirnya mereka pun merasa miskin jika hanya tinggal di desa dan bertani saja. Urbanisasi pun terjadi secara besar-besaran, para petani meninggalkan sawahnya, para nelayan meninggalkan pantainya, dan mereka semua kemudian lebur dalam perindustrian.

Akan tetapi, apa yang terjadi? Di penghujung tahun 2008 media massa Indonesia ramai memberitakan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana.<sup>1</sup> Semua karyawan yang dikenakan PHK ini adalah mereka yang bekerja di dalam industri-industri. Dengan munculnya krisis ekonomi global, maka industri-industri berusaha melakukan efisiensi, dan yang tak dapat dielakkan lagi adalah merumahkan karyawannya atau pemutusan hubungan kerja. Hal ini tak dapat dihindarkan kecuali kalau mau membiarkan perusahaannya bangkrut, dan akibatnya akan semakin banyak lagi orang yang kehilangan pekerjaan. Rupanya, sebetulnya ini merupakan masalah klise yang pernah terjadi pula di Eropa ratusan tahun yang lalu.

“Selain Gorres, para pemikir sosial Katolik, seperti (Franz von Baader 1765-1841), (Franz Josef Ritter von Buß 1803-1878) menyibukkan diri dengan menganalisis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis. Salah satu akibat paling nyata adalah urbanisasi. Tegasnya, kawasan sekitar industri menjadi tempat hunian dan tempat bertumbuhnya kemiskinan.” (Kristiyanto, OFM, 2008).

Konsolidasi kapitalisme telah membuat pemiskinan sistemik tak dapat dihindarkan (Escobar, 1995). Apabila diperkenankan berandai-andai, apakah yang akan terjadi andai para petani tidak meninggalkan sawahnya dan terjun dalam industri secara besar-besaran? Apakah yang akan terjadi andai pemerintah Orde Baru hingga Reformasi tidak terlalu memfokuskan diri dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didongkrak oleh penghasilan industrialisasi dengan komoditas eksportnya? Apakah yang akan terjadi andai pembangunan lebih ditekankan pada agraria dan kelautan sehingga para petani dan nelayan tidak berbondong-bondong mencari sumber nafkah yang lain? Bukankah dalam era globalisasi seperti sekarang ini banyak industri sangat bergantung kepada ekspor dan impor? Bukankah jika Indonesia tidak terlalu “membebek” ingin memajukan ekonomi negaranya lewat jalur industrialisasi, dampak domino krisis ekonomi global tidak akan terlalu dirasakan

---

<sup>1</sup> Kompas, memberitakan bahwa sampai 28 November 2008 sedikitnya 15.000 orang telah kehilangan pekerjaan dan 50.000 orang sedang menunggu pengesahan PHK. (Kompas, “Jumlah PHK Meroket,” 1 Desember, 2008) Namun, tidak lama kemudian pada tanggal 2 Desember 2008 ditulis bahwa yang menjadi korban PHK sudah mencapai ratusan ribu orang. (Kompas, “Harus Siap Tidak Populer,” 2 Desember 2008)

pahitnya seperti yang akhirnya terjadi di tahun 1998,1999, dan bahkan 2008? Para petani akan terus mengerjakan sawahnya, para nelayan akan terus menangkap ikan di laut, semua itu dengan bantuan berbagai fasilitas pemerintah mulai dari teknologi penanaman bagi petani atau teknologi penangkapan bagi nelayan, sampai pemasaran. Dengan demikian, sekalipun terjadi krisis ekonomi besar-besaran di dunia global, pasar domestik Indonesia masih dapat terus berjalan dengan baik karena bahan baku sampai pasarnya ada di dalam negeri. (Kuntariningsih dan Mariyono 2014) menegaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kebijakan di tingkat nasional hingga lokal untuk mendiseminasikan teknologi pertanian di daerah pedesaan melalui faktor sosial, ekonomi, juga kelembagaan.

Namun, apa boleh buat, kebijakan sudah diambil. Slogannya adalah industri padat karya sangat cocok untuk Indonesia yang jumlah populasinya tinggi karena dapat mengurangi pengangguran. Sungguh, slogan yang berbau mitologis. Kenyataannya, saat itu di sekitar tahun 2008 semua orang melihat dengan jelas bahwa ternyata industrialisasi itulah yang mengakibatkan PHK di mana-mana. Jika dikatakan industri mengurangi pengangguran, sejak dulu sekali sudah berabad-abad lamanya bangsa Indonesia jarang menganggur karena selalu ada lahan yang harus ditanam dan hasil lautan yang dapat dipanen. Jika dikatakan tanah untuk ditanam tidak ada lagi, hal ini juga tidak benar karena wilayah Indonesia sangat luas dan kekayaan alamnya luar biasa. Kekurangannya justru terletak dalam masalah manajemen. Gurvich (2016) dengan jeli melihat bahwa masalah manajemen yang terjadi di banyak negara berkembang ini seringkali dilatarbelakangi pula oleh politik.

Tanpa disadari, kehadiran industrialisasi dan lebih lagi sekarang globalisasi, semakin menipiskan sifat egaliter dalam kehidupan sosial masyarakat petani dan nelayan. Mereka yang terjun dalam bidang industri merasa lebih mampu baik dalam hal ekonomi maupun ketrampilan, yang tentunya juga akan terungkap dalam gaya hidup. Stratifikasi masyarakat semakin berlapis-lapis sehingga sebagai konsekuensinya akan ada golongan yang disebut sebagai orang-orang miskin. Franz von Baader (1765-1841) melihat implikasi politis masalah serupa yang pernah terjadi di Jerman pada masa hidupnya. Ketika itu industrialisasi telah melahirkan sebuah piramida dalam kehidupan bermasyarakat dengan para penguasa di pucuk piramida dan bagian yang terbesar adalah orang miskin yang berada di dasar piramida. Orang miskin dalam hal ini adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan. Seringkali kemiskinan diartikan sebagai suatu kekurangan dalam memperoleh nafkah hidup sehari-hari (Bhagwandin, 1993).

### **C. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan diungkapkan oleh sebuah kata, namun mengandung banyak arti. (Coudouel 2002) menggambarkan bahwa kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah tidak ada tempat tinggal. Kemiskinan adalah jatuh sakit dan tidak mampu untuk pergi berobat. Kemiskinan adalah tidak ada akses untuk memperoleh pendidikan dan tidak bisa membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dari saat ke saat tanpa punya harapan akan hari depan. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena sakit akibat kekurangan air bersih.

Mother Teresa mengatakan bahwa rasa tidak dikehendaki, tidak dikasihi, dan tidak dipedulikan adalah kemiskinan yang paling besar. Kemiskinan memiliki banyak wajah, namun secara umum kemiskinan merupakan situasi yang darinya orang ingin melepaskan diri. Singkat kata, kemiskinan adalah ketidakberdayaan, tidak terwakili, dan tidak memiliki kebebasan.

Memandang berbagai isu yang ada di balik kata kemiskinan, orang akan segera berpaling kepada pembangunan sebagai sumber harapan pemberi solusi. Sayangnya, pembangunan acapkali dijalankan sebagai suatu program yang berwawasan sempit, sekedar berkaitan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi.

Pembangunan di Indonesia pada tahun sekitar 2008 dengan jelas menunjukkan fakta ini. Jalan layang dan jalan tol yang gagah dianggap sebagai kemajuan pembangunan walau di kolongnya bermukim banyak masyarakat miskin yang tinggal dalam rumah terbuat dari kardus dan bahan-bahan lain seadanya.<sup>2</sup> Dengan demikian, pembangunan tak dapat menjawab teriakan orang miskin yang setiap hari berhadapan dengan kemungkinan dapat uang atau tidak, bisa makan atau lapar, hidup atau mati. Ketika para petani sudah sehari-hari berteriak krisis pupuk, barulah pemerintah pusat duduk untuk berunding. Setelah pemerintah pusat memutuskan untuk segera membagikan pupuk bersubsidi, pemerintah daerah berlambat-lambat dalam operasi pasar.<sup>3</sup> Ini hanyalah salah satu fenomena dari berbagai fenomena yang menunjukkan betapa jarangnyanya pembangunan Indonesia di masa lampau berpihak kepada masyarakat miskin.

Bahkan, ketika pembangunan berfokus terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, masyarakat miskin pun tak tersentuh karenanya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,2 persen pada tahun 2008 menjadi kebanggaan pemerintah. Akan tetapi, sebetulnya harus jeli dilihat, dari manakah sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Ternyata, dari komoditas ekspor, pasar modal, dan konsumsi masyarakat. Ini berarti yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah golongan masyarakat yang memiliki cukup banyak uang. Pengamat ekonomi Aviliani meneguhkan hal ini dengan mengatakan bahwa jumlah orang kaya Indonesia meningkat 16 persen. Pada zaman Orde Baru pun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus, namun kemajuan itu dihasilkan hanya dari sekitar 200 pengusaha terkaya Indonesia saja. Semakin lama semakin terlihat nafas kapitalisme berhembus semakin kuat di Indonesia. Padahal, Karl Marx berteori bahwa jika kapitalisme berkuasa akan terjadi pergeseran kelas dengan naiknya kaum proletar yang menghancurkan kapitalisme dan menggantikannya dengan sosialisme. Rasanya, bagi masyarakat Indonesia yang religius, baik kapitalisme maupun sosialisme bukanlah pilihan yang cocok. Kaum liberal, kekuasaan uang tanpa agama, telah menyebabkan lahirnya sosialisme, kekuasaan buruh tanpa Allah. (Kristiyanto, 2008) Kondisi ini membuat Indonesia berada di ambang krisis. Jumlah masyarakat miskin yang hampir 50 persen pada tahun 2008 (menurut data World Bank) bukanlah jumlah yang sedikit.<sup>4</sup> Krisis ekonomi global akan membuat kondisi memburuk, terbukti dengan semakin banyaknya orang yang mengalami PHK dari hari ke hari. Dampak sosialnya tentu akan sangat besar. Sayangnya, banyak orang yang menyandang jabatan sebagai tokoh pembangunan hanya sibuk mengutak-utik angka saja yang semuanya dalam bilangan ekonomi. Padahal, kemiskinan bukan sekedar kekurangan uang. Perlu pengamatan yang lebih jauh ke dalam kehidupan sosial untuk mengenali akar masalah dan mencari cara untuk mengantisipasinya.

“Jika kita ingin mengenal masa sekarang ini, kita harus berusaha mencarinya dalam masalah sosial. Jika kita berhasil menangkapnya, maka kita mengerti apa makna masa sekarang ini. Tetapi jika kita tidak berhasil, maka masa sekarang ini dan masa depan menjadi teka-teki.” (WE Freiherr von Ketteler, 1848)

---

<sup>2</sup> Kondisi seperti ini dapat dijumpai di banyak tempat di kota-kota besar di Indonesia. Walaupun pemerintah telah berkali-kali mengusir mereka, namun banyak di antaranya yang kembali dan membangun lagi tempat tinggalnya.

<sup>3</sup> Berita selengkapnya dapat dibaca pada Harian Kompas, Senin, 1 Desember 2008 mengenai revitalisasi pupuk, dan beberapa artikel lainnya pada beberapa hari yang berbeda sekitar akhir November 2008- awal Desember 2008.

<sup>4</sup> Menurut standar Bank Dunia, garis kemiskinan absolut adalah US\$ 1/hari untuk satu orang. Sementara Garis kemiskinan moderat US\$ 2/hari. Dengan standar Bank Dunia, jumlah orang miskin absolut di Indonesia pada tahun 2008 ada 62 juta jiwa. Perlu diperhatikan bahwa 62 juta jiwa ini adalah mereka yang miskin absolut. Selebihnya adalah mereka yang berpenghasilan sedikit lebih baik, tetapi masih termasuk miskin.

#### D. Melepaskan Belunggu Kemiskinan

Amartya Sen (2000) memandang pembangunan sebagai sebuah proses yang dapat membawa masyarakat menikmati kebebasannya. Pernyataannya ini cukup melegakan, karena ia tidak hanya melihat pembangunan dalam wawasan yang sempit. Dikatakannya bahwa kebebasan seseorang dipengaruhi juga oleh kebebasannya berpolitik, peluang sosial yang dimilikinya, fasilitas ekonomi, jaminan keamanan, dan jaminan ketransparanan.

Membebaskan masyarakat dari belunggu kemiskinan sebetulnya merupakan buah dari pembangunan yang bertujuan menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang utuh.<sup>5</sup> (World Bank 2002) mengatakan ada tiga aspek yang memengaruhi ketidakutuhan keberadaan seorang manusia, yaitu:

- Kemiskinan, bisa dilihat baik secara individu atau rumah tangga. Mereka yang digolongkan miskin adalah mereka yang tak memiliki sumber-sumber daya atau kemampuan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Ketidakmerataan distribusi pendapatan, konsumsi, atau segala bentuk atribut lainnya yang berhubungan dengan populasi.
- Kerentanan, dalam hal ini diartikan sebagai risiko yang dimiliki seseorang atau rumah tangga untuk menjadi miskin, atau semakin jatuh dalam kemiskinan yang lebih besar di masa depan.

Pendekatan World Bank ini merupakan pendekatan ekonomi, namun bisa dipahami karena bagaimana pun World Bank merupakan lembaga keuangan. Satu hal yang bisa dipetik dalam hal ini adalah bahwa banyak orang maupun lembaga di berbagai penjuru dunia berpikir keras dan berjuang sedapat mungkin untuk mengatasi kemiskinan. Bill Wallace, Ekonom Senior Bank Dunia mengatakan bahwa aspek kemiskinan yang tidak berkaitan dengan pendapatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya masih cukup memprihatinkan dan prestasi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangganya dalam berbagai bidang.

Berdasarkan semua hal ini, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat membebaskan belunggu masyarakat dari kemiskinan perlu dilakukan:

- Pengembalian hak rakyat untuk dapat menjadi manusia yang utuh. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan sosial yang cermat untuk mengenali kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
- Pembongkaran kepalsuan-kepalsuan pembangunan dan mengembalikan ke tatanan yang seharusnya.

#### E. Pengembalian Hak Rakyat

Sukses yang terjadi tahun 1998 di Indonesia sebetulnya bukanlah tujuan, tetapi langkah awal untuk menata ulang seluruh tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Setelah Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya, banyak orang menyadari bahwa kekuasaan monolitik dalam waktu yang lama sangat potensial untuk terciptanya negara yang korup, otoriter, dan *omnipotent*. Oleh karena itu, penciptaan tatanan politik yang demokratis sebagai cita-cita perubahan dipahami sebagai upaya penciptaan penyebaran sumber daya kekuasaan ke dalam institusi dan aktor politik yang plural. (Diamond, 2003 dalam Hanif, 2008)

Pengembalian hak rakyat berarti pengembalian demokrasi dalam republik yang sesungguhnya<sup>6</sup>. Sejak tahun 2000 World Bank percaya bahwa kemiskinan bisa dihapus. Dengan tidak adanya lagi orang miskin, berarti tidak ada lagi orang yang

---

<sup>5</sup> Tujuan pembangunan ini dapat dilihat pada GBHN dalam perspektif 2025 dalam bab mengenai Visi GBHN Perspektif 25 tahun.

<sup>6</sup> Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah tersebut.

terasing di negaranya sendiri. Rakyat memiliki kedaulatan atas negara dan pemerintah menjalankan pembangunan untuk mewujudkan aspirasi rakyatnya.

“Apabila negara merupakan ungkapan kehendak umum para warganya, maka manusia tidak lagi mengalami keterasingan di dalamnya. Kehendak negara adalah kehendak mereka. Dalam mentaati negara, mereka seperti mentaati diri mereka sendiri. Negara betul-betul menjadi *res publica*, republik, “urusan umum”. Negara tidak lagi asing karena tidak lagi merupakan milik raja atau milik sekelompok orang, melainkan milik semua. Manusia tidak terasing di dalamnya.” (Jean Jacques Rousseau, 1772-1778)

Pada tahun 2001 masyarakat di beberapa daerah di Indonesia<sup>7</sup> menyambut antusias isu otonomi daerah. Mereka berharap dengan adanya otonomi daerah, nasib mereka akan menjadi lebih baik karena pemerintah lebih fokus membangun daerahnya. Namun, rupanya cita-cita reformasi yang hendak menciptakan suasana demokratis masih belum terwujud di sana. Beberapa tempat di Indonesia masih identik dengan kemiskinan dan rakyat tidak memiliki kedaulatan apa-apa di tanahnya sendiri. Keputusan mengenai berbagai kebijakan yang tidak bijak itu masih dipegang sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang jarang memerhatikan nasib rakyatnya.

Ketika VOC melakukan survai di daerah-daerah Nusa Tenggara sekitar tahun 1819-1825, mereka menyimpulkan bahwa di sana tidak ada potensi alam yang memadai baik dari segi pertanian, perkebunan, juga pertambangan. Itulah sebabnya pemerintah Belanda enggan berinvestasi di pulau tersebut, dan hanya menempatkan para misionaris yang menyebarkan agama Katolik. Tentu saja, sikap ini tidak boleh diteruskan pula oleh para pemerintah Indonesia di zaman kemerdekaan. Sikap Belanda masih dapat dimengerti karena mereka memang datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka pun tak memiliki kewajiban apa-apa terhadap masyarakat Nusa Tenggara. Sebaliknya, pemerintah Indonesia tidak boleh mengadopsi sikap ini karena posisinya berbeda. Semua masyarakat Nusa Tenggara adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Itu berarti, mereka juga berhak untuk menikmati hasil pembangunan Indonesia. Jika laju pembangunan Indonesia dibanggakan sebagai sebuah prestasi karena pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, seharusnya masyarakat Nusa Tenggara menikmati juga pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika Indonesia bangga dengan jalan tol dan jalan layang yang bisa dilihat di Jakarta, seharusnya masyarakat Nusa Tenggara juga bisa mempunyai sarana transportasi yang memungkinkan mereka menjual hasil kebunnya ke daerah-daerah lain. Dari sini dapat dilihat bahwa kemiskinan di banyak daerah terpencil di Indonesia baru dapat diatasi jika kebijakan sosial, politik, dan ekonominya berpihak kepada masyarakat miskin.

Lalu, apa yang harus dilakukan jika pemerintah selalu saja “lupa” akan rakyatnya? Dalam hal ini, perlu dikaji kembali, apakah sistem demokrasi sekarang cukup sesuai dan adil untuk masyarakat di daerah miskin? Apakah para legislatif sungguh mewakili aspirasi konstituennya, dalam hal ini masyarakat miskin yang tinggal di daerah-daerah terpencil? Apakah suara masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan selama ini didengar? Jika jawabannya adalah tidak dan tidak, (alternatif Ife 2002) yang menyarankan pembangunan berbasis masyarakat dapat dipertimbangkan. Di sini, dilakukan pelembagaan masyarakat agar dapat menjadi aktor-aktor pembangunan dengan program pemberdayaan dahulu sebelumnya. Sistem demokrasi bisa didesain baru, tidak perlu mengikuti yang sudah umum. Perlu dicari bentuk yang lebih menjamin masyarakat untuk bersuara dan berpolitik bebas, serta ada jaminan ketransparanan satu sama lain. Dengan demikian, pembangunan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian langsung ke lapangan pada tahun 2008

partisipatif menjadi cocok untuk mereka karena memberikan koridor-koridor yang cukup bagi masyarakat akar rumput. Demokrasi representatif seperti yang dilaksanakan di Indonesia pada masa lampau terbukti sudah tidak relevan lagi bagi mereka.

## F. Kepalsuan Pembangunan

Jabatan pemerintah daerah merupakan sebuah jabatan kebanggaan yang mengangkat strata sosial seseorang. Hal ini disadari betul oleh kebanyakan pejabat di kawasan Nusa Tenggara sehingga mental feodalisme merupakan hal yang umum ditemukan di kalangan mereka. Pembangunan yang mendasar di NTT tidak dijadikan prioritas, ada kesan asal bangun walau akhirnya seringkali mubazir dan tak berguna. Sebetulnya hal ini juga dengan mudah ditemukan di daerah-daerah tertinggal lain di Indonesia, misalnya di Kalimantan Barat dan Papua.<sup>8</sup>

Flores, salah satu pulau di Nusa Tenggara merupakan pulau yang gersang karena mendapatkan sedikit sekali curah hujan. Namun, bukan berarti tanah mereka tidak subur. Jambu mete bisa tumbuh dengan subur dan baik di sana. Pisang dari Kabupaten Borong sangat bagus dan produktif, sayangnya seringkali hanya berakhir di kandang babi. Kebijakan otoritas lokal belum dapat memfasilitasi pendistribusian hasil alam rakyatnya. Padahal, untuk ukuran zaman modern yang serba maju ini, bisa dibilang Flores sangat dekat dengan Bali dan Surabaya yang memiliki permintaan (*demand*) pasar cukup tinggi. Oleh karena tidak adanya fasilitas ekonomi dan peluang sosial yang memadai,<sup>9</sup> tak mengherankan jika akhirnya masyarakat menyerahkan masalah pemasaran dan pendistribusian komoditas perkebunan mereka kepada tengkulak. Tengkulak mempunyai kuasa untuk menentukan harga karena ia berkuasa secara monopoli, sementara rakyat tak punya pilihan lain. Cerita selanjutnya bisa ditebak, tengkulak menjadi kaya raya dan menginvestasikan uangnya di propinsi lain sehingga ia bertambah kaya dengan ekspansi usahanya. Di lain pihak, masyarakat miskin tetap miskin baik secara ekonomi maupun intelektual.

Sebetulnya hal ini tidak usah terjadi andai saja bank-bank pemerintah daerah mau berpihak kepada rakyat kecil. Sayangnya, bank-bank selalu saja memegang aliran kapitalismenya dengan ketat<sup>10</sup>:

- Bank harus untung dari usaha deposito dan kredit, tanpa membedakan apakah uang itu didepositokan atau dipinjam oleh orang kaya atau orang miskin; yang penting memenuhi prinsip-prinsip ekonomi yang sangat rasional.
- Dengan premis ini maka kredit yang dikucurkan adalah kredit dalam jumlah besar yang menguntungkan bank, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya saja.
- Oleh karena itu, tidak rasional dan tidak ekonomis kalau bank meminjamkan uangnya dalam jumlah kecil. Kesimpulannya, karena alasan rasional dan ekonomis, tidak mungkin bank berpihak kepada orang miskin.

Jika melihat sikap bank yang seperti itu, bisa dibilang para tengkulak adalah pahlawan bagi masyarakat. Tengkulak tidak banyak bicara soal agunan, uangnya bisa dipinjam kapan saja, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Itulah sebabnya tengkulak tumbuh subur di daerah-daerah miskin karena pemerintah dan bank-bank daerah tidak dapat memberikan pertolongannya.

---

<sup>8</sup> Berdasarkan observasi langsung ke lapangan

<sup>9</sup> Fasilitas ekonomi dan peluang sosial merupakan dua dari lima instrumen kebebasan yang digagas oleh Amartya Sen (2000)

<sup>10</sup> Premis-premis bank yang super ketat ini diungkapkan oleh Robert M.Z. Lawang dalam pengantarnya untuk buku "Bank Kaum Miskin" tulisan Muhammad Yunus.

## G. Kesimpulan dan Saran

Tulisan ini tentu saja tidak bisa dikatakan berbicara mengenai pembangunan di Indonesia pada masa sekarang, yaitu periode pembangunan 2015-2019, karena periode ini belum selesai dan karenanya belum bisa diulas. Akan tetapi, tulisan ini merupakan gagasan keprihatinan akan pembangunan ekonomi di Indonesia yang telah terjadi selama ini, yang semoga dapat menjadi rambu etika dalam pembangunan Indonesia selanjutnya.

Kesimpulan dari tulisan ini sebetulnya adalah bahwa ketertinggalan pembangunan ekonomi selama ini terjadi karena pola pembangunan yang diterapkan tidak disesuaikan dengan kondisi akar rumput di lapangan. Apa yang dapat berhasil di negara lain tentu belum tentu bisa berhasil pula di Indonesia karena ada banyak faktor yang berbeda. Oleh sebab itu, pinjaman luar negeri yang mendikte perlu dikritisi dengan cermat karena bantuan itu bisa berbalik menjadi belenggu berjudul hutang yang semakin mencekik keuangan negara.

Kesimpulan kedua, bahwa pendiktean dari negara donor acapkali menurun pula di dalam aliran feodalisme yang dianut oleh para pemerintah daerah, baik disengaja maupun tidak. Hal ini tentu saja semakin membuat rakyat kecil terlupakan dan muncul lapisan tengah yang berperan sebagai tengkulak. Walau tak dapat disangkal kehadiran para tengkulak ini dibutuhkan para petani untuk menjual hasil kebunnya, namun tak dapat disangkal pula kondisi ini membuat rakyat kecil semakin terjajah secara ekonomi. Kesimpulan sekaligus saran terakhir, dibutuhkan sosok pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya, tidak membiarkan diri didikte oleh kebijakan asing, dan berani membubarkan lapisan tengah serta segala kroninya yang selama ini telah menindas rakyat kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

Bhagwandin, Stephen. 1993. "Factors That Can Be Attributed to The Perpetuation of Poverty in The Third World." Student Theses, Cuny Academic Works, City University of New York, USA.

Coudouel Aline, Jesko S. Hentschel, Quentin T. Wodon. 2002. "Poverty Measurement and Analysis." *Core Techniques and Cross-Cutting Issues, Vol. 1*, PRSP Sourcebook, World Bank, Washington D.C., USA. (<https://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources>).

Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Gurvich, Evsey. 2016. "Institutional Constrains and Economic Development." *Russian Journal of Economics*, Volume 2 Issue 4, Russia.

Hanif, Hasrul. 2008. *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ife, Jim. 2002. *Community Development, Community Based Alternatives in Age of Globalization*. Australia: Longman.

Kristiyanto, Eddy. 2008. *Sakramen Politik, Mempertanggungjawabkan Memoria*. Yogyakarta: Lamalera.

Kuntariningsih, Apri dan Joko Mariyono. 2014. "Adopsi Teknologi Pertanian untuk Pembangunan Pedesaan: Sebuah Kajian Sosiologis." *Agriekonomika*, Vol. 3 No. 2.

Sen, Amartya. 2000. *Development as A Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.

Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin, Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Depok: Marjin Kiri.

Harian Kompas. 2008. Berbagai edisi sepanjang bulan November – Desember.